

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Aditama, TY, 2000, Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Adhani , R 2016, Mengelola Rumah Sakit , Penerbit Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin
- Agustina, E , 2020, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Cetakan Kedua, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
- Ali, Achmad , 2015, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta,
- Asyhadie, Z , 2018, Aspek Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Cetakan Kedua , Penerbit PT Raja Grafindo Persada , Depok
- Azwar, A, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Penerbit Bina Rupa Aksara, Jakarta
- Chazawi, A , 2020, Malapraktek Kedokteran, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika Offset , Jakarta
- Dahlan, Sofwan , 2003, *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
- Djoyohadibroto, Darmanto, 1997, Kiat Mengelola Rumah sakit, Penerbit Hypocrates, Jakarta.
- Gaspersz,Vincent,2001, Metode Analisis untuk Peningkatan Kualitas, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
- Guwandi, J, 1996, Dokter, Pasien dan Hukum, Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Herlambang, S , 2016, Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Cara Mudah Memahami Manajemen Pelayanan di Rumah Sakit dan Organisasi Pelayanan Kesehatan Lainnya, Cetakan Pertama, Penerbit Gosyen Publishing
- Hermien Hadiati Koeswadji. “Hukum untuk Perumahsakit” (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002)
- Heryanto, Bambang. , 2010, “Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.2 Mei 2010;
- Indar, 2020, Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat, Cetakan VI, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2020
- Indar, Arifn, MA, Darmawansyah, Nurhayani, 2020, Sengketa Pelayanan Kesehatan dan jaminan Kesehatan nasional, Cetakan I, Penerbit

- Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2020
- Indar, 2019, Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan, Cetakan II, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2019
- Irwansyah, 2020, Kajian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 214
- Jayanti, Nusye Kl. 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*. Yogya- karta: Pustaka Yustisia;
- Koeswadi.Hermien. H., 1998, Hukum Kesehatan (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998
- Machmud, Syahrul. ,2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: MandarMaju
- Marzuki, PM , 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi , Penerbit Kencana , Jakarta
- Muchtar, M , 2020, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Penerbit Pustaka Baru Press, Jogjakarta
- Muninjaya, AG, , 1999, Manajemen Kesehatan, Penerbit EGC, Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta Bandung
- Pohan, Imbalo S,,2007, Jaminan Mutu Layanan Kesehatan, Dasar dasar, Pengertian dan Penerapan, Penerbit EGC,Jakarta
- Prasojo, Eko dkk. 2006. Kinerja Pelayanan Publik. Yappika, Jakarta.
- Rachmawaty, N ; Harigustian, Y , 2019, Manajemen Patient Safety, Konsep dan Aplikasi Ptient Safety dalam Kesehatan, Penerbit PT Pustaka baru, Jogjakarta
- Rahardjo, S , 2014, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sadi, MI , 2019, Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia, Cetakan Ketiga, Penerbit Prenamedia Group, Jakarta, 2019
- Sampurna, Budi “Malpraktik Medik dan Kelalaian Medik”, Universitas Indonesia, Jakarta, Internet, download 27 April 2009;
- Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik, Membangun Sistem manajemen Kinerja meningkatkan produktivitas, Bagian kedua, Penerbit CV Mandar Maju
- Setyawan, J :, Setyawan, D , 2016, Sistem Mnajemen Rumah Sakit, Edisi

- Pertama, Penerbit BPFJ Jogjakarta, Jogjakarta
- Sinambella, Lijan Poltak. 2014. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi. PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Siregar, Rospita Adelina, Anggraeni Endah Kusumaningrum, dan Sabir Alwy, 2020, "Etika Profesi & Hukum Kesehatan." (2020): 1-242.
- Sitanggang, T , 2020, Hukum Kesehatan Perspektif Perdata dan Pidana, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020
- Situmorang, R , 2020, Tanggungjawab Hukum Dokter Dalam Malpraktek, Penerbit CV Cendekia Press, Jakarta, 2020
- Soekanto, Soerjono dan Herkutarto. 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: RemajaKarya.
- Soeparto,P: Hariadi, R:Koeswadji, HH:, Daeng, BH: Sukanto, H: Atmodiriono, H (Editor), 2006, Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan, Edisi 2, Airlangga University Press, Surabaya, 2006
- Soeroso, Santoso, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit, Suatu Pendekatan Sistem, Penerbit EGC, Jakarta
- Suharto B. Cahyono, 2008, Membangun Budaya Keselamatan Pasien dalam Praktik Kedokteran. (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
- Suharjo B Cahyono, Membangun Budaya Keselamatan Pasien dalam Praktek Kedokteran, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hlm. 295.
- Sutarno, Z , 2014, Hukum Kesehatan, Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, Penerbit Setara Press, Malang
- Syafrudin, SR , 2009, Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Cetakan Pertama, Penerbit PT Trans Info Media, Jakarta
- Syahdeini, SR , 2020, Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malpraktek Tenaga Medis, Jilid 1, PT Penerbit IPB Press, Bogor
- Triana Ohoiwutun. "Bunga Rampai Hukum Kedokteran , 2008 : Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan Undang-Undang Praktek Kedokteran, Bayu Media Publishing, Malang.
- Triwibowo, C , 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Cetakan Pertama, Penerbit Nuha Medika, Jogjakarta
- Yahya MJ, 2020, Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum, Cetakan Kesatu, Penerbit PT Refika Aditama , Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Kesehatan RI, 2014, Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Jakarta, 2014

Kementerian Kumham RI, 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta, 2018

Kementerian Kesehatan RI, 2009, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 tahun 2011 tentang Komite Medik Rumah Sakit, Jakarta, 2011

Kementerian Kesehatan RI, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum, Jakarta, 2018

Kementerian Kesehatan RI, 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, Jakarta, 2020

Kementerian Kumham RI, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kementerian Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tentang Keselamatan Pasien, Jakarta

Kementerian Kesehatan RI, 2009, Undang Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan, Jakarta

Kementerian Kesehatan RI, 2009, Undang Undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit, Jakarta

Kementerian Kesehatan RI, 2004, Undang Undang Nomor 29 Tentang Praktek kedokteran, Jakarta

Kementerian Kesehatan RI, 2016, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/535/2016 Tentang Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Kementerian Kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 tentang Penyelenggaraan Komite medik di Rumah Sakit, Jakarta

Kementerian Kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, Jakarta

Kementerian Kesehatan R.I., 2008, Buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety). Jakarta:

KKPRS.2008, Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP). Edisi 2. Jakarta: KKPRS.

Kementerian Kumham RI, 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kementerian Kumham RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Artikel dan Makalah

Afzal M. 2016. *"Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Kelalaian Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan Dari Aspek Hukum Pidana"*. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram. Volume 2 No. 1 April 2016.

Cecep Rieibowo dan Zainuddin Harahap, 2016, "Studi Kualitatif: Peran handover dalam meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit." Pena Medika Jurnal Kesehatan 6, no. 2, 2016: 43-51.

Hary Iskandar, Sabir Alwy, dan Nurul Hudi, 2018, "Kajian Yuridis Penggunaan Rekam Medis Untuk Verifikasi Pembiayaan Layanan Kesehatan." Medical Technology and Public Health Journal 2, no. 1 (2018): 35- 41.

Mohamad IR. 2019. *"Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia"*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Volume 8 Nomor 2 2019.

Muhammad Ikhsan Lukman, Slamet Sampurno, dan Amir Ilyas, 2018. "The Implementation Right To Attain Second Opinion Patient Of National Health Insurance Participant." Unram Law Review 2, no. 1 (2018).

Retnowati A. 2013. "Politik Hukum Dalam Menata Rekam Medis Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit, Dokter Dan Pasien". Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Volume 2 No. 2 Mei 2013.

Simamora TP, Sonya AB, Indra E, Robinson S. 2020. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum”*. Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Volume 12 No. 2 Juli 2020.

Supriyatin U. 2018. *“Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”*. Fakultas Hukum Universitas Galuh. Volume 6 No. 1 Maret 2018.

Supriyatin U. 2018. *“Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan”*. Fakultas Hukum Universitas Galuh. Volume 6 No. 2 September 2018.

Laman

<https://news.detik.com/berita/d-2710494/kisah-dr-ayu-menolong-pasien-dipenjara-bebas-kini-bersaksi-di-mk>

<https://www.antarane.ws.com/berita/1560740/ibu-hamil-ditolak-rs-karena-biaya-idi-makassar-luruskan-disinformasi>

<https://regional.kompas.com/read/2020/12/13/14350771/duka-keluarga-ibu-hamil-yang-meninggal-usai-ditolak-7-rumah-sakit-tak-punya?page=al>

https://www-hukumonline-com.translate.goog/berita/a/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-t6035beb69e003?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

A. Penjelasan Wawancara

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pandangan Narasumber dan atau informan mengenai penerapan Hukum keselamatan pasien dalam pelayanan rumah sakit, mengidentifikasi masalah ataupun kendala yang dihadapi dan menganalisis berkaitan dengan keselamatan pasien yang sudah ada terkait dengan Undang Undang Kesehatan dan Undang Undang Rumah Sakit. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan Tanggungjawab Hukum Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.

B. Daftar Pertanyaan

1. PELIMPAHAN WEWENANG

a. Pengarahan

- 1) Bagaimana Manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) memberikan pengarahan dengan baik terhadap Instalasi / Unit terkait penerapan keselamatan pasien?
- 2) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) memberikan pengarahan bagi staf dalam penerapan keselamatan pasien?

b. Pelaksanaan

- 1) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) membuat standar pelaksanaan di Instalasi / Unit pelayanan tentang tanggung jawab hukum keselamatan pasien?
- 2) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) selalu memberikan petunjuk teknis kepada staf terkait tanggung jawab hukum keselamatan pasien?
- 3) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan

Wadir Pelayanan) melakukan pembimbingan ke Instalasi / Unit dan staf terkait tanggung jawab hukum keselamatan pasien?

- 4) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) secara rutin mengadakan pelatihan keselamatan pasien bagi staf?

c. Pengawasan

- 1) Bagaimana pihak manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) melakukan pengawasan kepada Instalasi/Unit terkait pada penerapan keselamatan pasien?
- 2) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) memberikan bimbingan dan dorongan kepada staf terkait penerapan keselamatan pasien?
- 3) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar keselamatan pasien?

2. HUBUNGAN KERJA, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

a. Hubungan Kerja

- 1) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) membangun hubungan yang baik kepada staf terkait pelaksanaan Keselamatan Pasien?
- 2) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) selalu membuat suasana kerja yang kondusif dan suasana cair ?
- 3) Bagaimana pihak manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) melibatkan staf dalam membuat keputusan terkait penerapan keselamatan pasien?

b. Koordinasi Kerja Keselamatan Pasien

- 1) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan

Wadir Pelayanan) melakukan koordinasi berjenjang kepada staf terkait pelaksanaan Keselamatan Pasien?

- 2) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) berkoordinasi untuk membuat situasi kerja yang kondusif untuk keselamatan pasien ?
- 3) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) membuat pedoman dan petunjuk teknis alur koordinasi penerapan keselamatan pasien?

c. Komunikasi Keselamatan Pasien

- 1) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) melakukan komunikasi efektif berjenjang kepada staf terkait tanggung jawab hukum Keselamatan Pasien?
- 2) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) berkomunikasi dengan setiap Unit/Instalasi tanggung jawab hukum keselamatan pasien ?
- 3) Bagaimana manajemen rumah sakit (Direktur dan Wadir Pelayanan) membuat alur komunikasi penerapan tanggung jawab hukum keselamatan pasien?

d. Staf bebas menyatakan pendapat kebijakan tanggung jawab hukum keselamatan pasien

- 1) Bagaimana anda mendapat umpan balik positif apabila ada suatu kejadian yang dilaporkan?
- 2) Bagaimana setiap orang wajib memperingatkan apabila melihat segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan pasien?

e. Keterlibatan staf dalam perubahan kebijakan perbaikan keselamatan pasien

1. Bagaimana anda sebagai staf bebas menyatakan pendapat dan memberi usulan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan?
2. Bagaimana staf dilibatkan dalam proses perubahan usulan kebijakan untuk perbaikan keselamatan pasien?
3. Bagaimana bentuk informasi perawatan dan keselamatan pasien selalu tersedia saat pergantian shift?

f. Komunikasi perawatan keselamatan pasien

g. Komunikasi arti penting keselamatan pasien

h. Komunikasi tanggung jawab hukum keselamatan pasien

- 1) Apakah setiap masalah pasien yang terjadi dirumah sakit selalu didiskusikan bersama dan dicari jalan keluarnya?
- 2) Bagaimana unit keselamatan pasien mendiskusikan cara mencegah terjadinya kesalahan atau Kejadian TidakDinginkan?
- 3) Bagaimana tanggung jawab hukum keselamatan pasien di rumah sakit selalu menjadi prioritas pelayanan?

3. KERJATIM

a. Komitmen Keselamatan Pasien

- 1) Bagaimana anda dan rekan kerja anda mendukung rumah sakit melaksanakan tanggung jawab hukum keselamatan pasien yang lebihbaik

- 2) Bagaimana rekan kerja anda tidak merasa keberatan ketika diajak berdiskusi tentang tanggung jawab keselamatan pasien?

b. Komunikasi ide / gagasan dan Tanggung jawab hukum

- 1) Bagaimana keterlibatan direktur dan wadir pelayanan terhadap kegiatan yang terkait dengan peningkatan program dan tanggung jawab hukum keselamatan pasien?
- 2) Bagaimana anda nyaman dan tidak kesusahan saat pembagian tugas dengan rekan kerja tentang tanggung jawab hukum keselamatan pasien?
- 3) Bagaimana cara anda berkordinasi dengan baik untuk mewujudkan pelayanan pasien yang sesuai dengan prosedur keselamatan pasien?

d. Kerja Tim tentang tanggung jawab hukum keselamatan pasien

- 1) Bagaimana bentuk kerja Tim bekerja secara efektif dalam pelayanan keselamatan pasien jika tidak berjalan sebagaimana semestinya?
- 2) Apakah Kerja Tim diatur dalam bentuk pedoman / petunjuk teknis terkait tanggung jawab hukum keselamatan pasien?
- 3) Bagaimana pola evaluasi Kerja Tim di Rumah Sakit / Manajemen terkait tanggung jawab hukum keselamatan pasien?